

ABSTRAK

Fenomenanya pelayanan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di penjara memang layak dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan, banyak tahanan atau napi yang mengalami hal serupa di penjara lain. Pemeriksaan kejiwaan mereka kepada ahlinya juga diperlukan untuk memastikan apakah mereka benar-benar gila atau hanya akal-akalan agar terhindar dari hukuman. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu implikasi yuridis terhadap keputusan menjalani pengobatan bagi narapidana gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

Metode penulisan skripsi ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini. dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan /doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan kemudian dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu, narapidana tetap menjalankan masa pidana sesuai dengan vonis hakim yang ditentukan walaupun selama kurun waktu tertentu, narapidana menjalani perawatan karena menderita gangguan jiwa, tetapi tidak mengurangi masa pidana yang harus dijalani dan selama menjalani perawatan tersebut tidak dapat disamakan dengan penahanan sehingga narapidana sepenuhnya tetap dibebankan masa pidananya dan perhitungan masa pidana sepenuhnya. implikasi yuridisnya dapat di konklusikan bahwa narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya tetap menjalankan sisa dari pidannanya setelah narapidana itu dinyatakan sembuh selama menjalani rehabilitasi.

Kata Kunci : *Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Gangguan Jiwa*

ABSTRACT

Phenomenon Services for people who experience mental illness in prison is worth to do. It is possible, many prisoners for or inmates who are experiencing similar things in other prisons. Then to a professional psychiatric examination is also necessary to ascertain whether they really crazy or just a subterfuge to avoid punishment. Issues raised in this thesis that the juridical implications of the decision to undergo treatment for mental disorders in prisoners Penitentiary Class I Surabaya.

The research type of this thesis is a empirical research which undertook interview model with stakes holder in prisoners penitentiary class I Surabaya. It used statute approach, namely the study of some regulations related to the issue raised. Statute approach was conducted by examining all regulation that become a focus of this research . in addition conceptual approach is the approach which started. From views and doctrines which developed in legal science. This approach becomes important owing to the understanding on views of legal concept that can be a base as well as is able to build. Legal opinion in order to settle legal issue. Based on the results of research in the field is to conduct interviews with the authorities and then linked with the Law No. 12 Year 1995 on Correctional Legislation and other regulations relating to the subject matter covered.

Based on the research results, the criminal inmates still run in accordance with the verdict, although during a specified period of time, because the treatment of prisoners suffering from psychiatric disorders, but does not reduce the crime that must be followed during treatment and can not be equated with detention so that inmates remain fully charged during the criminal and criminal calculation entirely. juridical implications can in conclusion that inmates who have psychiatric disorders in prison Surabaya Class I keep running the rest of criminal after it was declared cured inmates while undergoing rehabilitation.

Keywords: Prisons, Prisoners, Mental Disorder